ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN

Perkawinan merupakan perbuatan hukum mempunyai akibat hukum yaitu persatuan harta yang didapat dalam perkawinan. Ketentuan persatuan harta dapat disimpangi dengan membuat perjanjian perkawinan, seperti dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu pertama, bagaimana pengaturan harta dalam perkawinan yang diterapkan dalam pembuatan akta perjanjian kawin dan yang kedua bagaimana pelaksanaan perjanjian kawin dapat memberikan perlindungan terhadap para pihak. Tujuan dari penulisan ini yaitu pertama untuk mengetahui pengaturan harta dalam perkawinan yang diterapkan dalam pembuatan akta perjanjian kawin, yang kedua untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian kawin untuk para pihak. Metode Penelitian adalah Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Spesifikasi dalam Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, Sumber dan Jenis Data yang digunakan yaitu yang pertama Data Primer berupa wawancara dengan narasumber, yang kedua Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer berupa Peraturan yang terkait dengan judul tesis ini, Bahan Sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian jurnal ilmiah, dan artikel, dan yang terakhir Bahan Tersier yaitu berupa kamus hukum ataupun internet. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pengaturan perjanjian perkawinan diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, dan KHI, perbedaan di antara ketiganya adalah pada sistem pengaturannya. Dalam hal perlindungan terhadap para pihaknya perjanjian kawin dapat memberikan keadilan bagi para pihaknya sehingga adanya hak dan kewajiban. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apapun yang menjadi bentuk dan landasan hukum yang digunakan oleh para pihak harus didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, lalu terkait dengan perlindungan para pihak dengan adanya perjanjian kawin harus dipenuhi dengan hak dan kewajiban yang adil bagi semua pihak. Untuk saran yang dapat diberikan yaitu pada perjanjian kawin seharusnya berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris yang berkekuatan hukum sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak, lalu untuk perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin adakalanya memperhatikan segala aspek agar bisa sesuai dan tidak merugikan para pihak.

Kata kunci: **perjanjian perkawinan, perlindungan hukum, perkawinan.**

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF ASSETS IN MARRIAGE BY MAKING DEEDS OF MARRIAGE AGREEMENT

Marriage is a legal act that has legal consequences, namely the association of assets obtained in marriage. The provisions of the association of assets can be distorted by making a marriage agreement, as in article 29 of Law Number 1 of 1974. The problem formulations in this thesis are first, how is the arrangement of assets in marriage that is applied in making a marriage agreement deed and secondly, how can the implementation of the marriage agreement be implemented. provide protection for the parties. The purpose of this writing is firstly to find out the arrangement of assets in marriage that is applied in making the marriage agreement deed, the second is to find out the form of legal protection against the marriage agreement for the parties. The research method is juridical empirical, which is a legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions in action at any particular legal event that occurs in society. The specifications in this study are descriptive analysis, sources and types of data used, namely the first primary data in the form of interviews with sources, the second secondary data consisting of primary legal materials in the form of regulations related to the title of this thesis, secondary materials in the form of books, research results from scientific journals and articles, and the last one is Tertiary Material, namely in the form of a legal dictionary or the internet. From the research results, it is known that the arrangement of the marriage agreement is regulated in the Civil Code, Marriage Law, and KHI, the difference between the three is in the regulatory system. In terms of protection of the parties, the marriage agreement can provide justice for the parties so that there are rights and obligations. The results of this research can be concluded that whatever forms and legal basis used by the parties must be based on the principle of freedom of contract and the fulfillment of the legal conditions of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, then related to the protection of the parties with the existence of a marriage agreement must be fulfilled. with fair rights and obligations for all parties. For advice that can be given, namely the marriage agreement should be based on the agreement of the parties and set forth in an authentic deed made by a notary with perfect legal force and binding for both parties, then for legal protection of property in the marriage agreement sometimes pay attention to all aspects to be compatible and not detrimental to the parties.

***Key words**: **prenuptial agreement, legal protection, marriage**.*